

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk adalah modal dasar pembangunan suatu bangsa, karena fungsi itulah penduduk menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan menekankan adanya aspek keseimbangan antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung lingkungan tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan akan generasi mendatang. Untuk itu, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) hadir sebagai Lembaga Pemerintah yang mempunyai fungsi guna menggalakkan Program Keluarga Berencana.

Guna menunjang program Keluarga Berencana, dibutuhkan tindakan maksimal dalam hal pelayanan KB. Pelayanan KB sendiri membutuhkan alkon/non alkon KB yang disimpan dalam gudang dan dicatat sebagai persediaan didalam aplikasi persediaan. Pihak pengawas persediaan perlu memastikan mulai dari terjaminnya ketersediaan alkon/non alkon KB hingga kelancaran pendistribusian. Oleh karena itu, kestabilan persediaan didalam suatu organisasi, khususnya organisasi sektor publik perlu mendapat perhatian dan pengawasan khusus. Kestabilan itu tidak hanya menyangkut jumlah unit yang tersedia, melainkan berkaitan dengan hal pengaturan, pengawasan, pemakaian rata-rata perhari, perhitungan pemesanan persediaan, yang secara tidak langsung akan memengaruhi penjadwalan pemesaana produk dan tindakan pendistribusian secara merata

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kab/Kota	Peserta KB Aktif															
	IUD		MOW		MOP		Kondom		Imolan		Suntik		Pil		Jumlah	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Kota Madiun	5301	4813	2729	2926	194	174	1392	1396	1194	1136	9677	9347	2116	1893	22603	14
Kota Surabaya	52260	52694	30748	30810	2715	2862	21494	20810	32777	35029	200621	200877	74626	80069	415241	278
Kota Batu	7901	8060	1858	1930	145	149	1975	2086	5515	5572	9204	9105	3898	4039	30496	5
Jawa Timur	772615	724878	289368	285637	27540	25765	112508	116949	664162	676974	3037467	3044168	1201986	1162885	6105646	6037256

Table 1.1 Data Penggunaan Alkon

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada grafik diatas terlihat bahwa penggunaan suntik dan pil KB terlihat dominan daripada penggunaan IUD, kondom, diafragma, dan kontrasepsi darurat. Namun belakangan, metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)/ metode kontrasepsi modern seperti sterilisasi, pil, IUD, susuk KB, kondom, intravagina/diafragma, kontrasepsi darurat dinilai lebih efektif untuk mencegah kehamilan bagi wanita dibandingkan metode kontrasepsi non jangka panjang (non-MKJP). Sehingga muncul suatu permasalahan baru yakni kelebihan persediaan (*overstock*) terhadap penggunaan suntik KB I Kombinasi.

Merujuk pada pengiriman suntik KB I kombinasi dari BKKBN Pusat jumlahnya melebihi dari unit pemakaian setiap bulannya. Akibatnya terjadi *overstock* yang menimbulkan banyaknya suntik yang harus dimusnakan setiap tahunnya karena sudah melebihi tanggal/*expired*. Hal ini bisa disebabkan karena banyak masyarakat yang mulai beralih dari sebagai metode kontrasepsi jangka pendek menuju IUD, usuk KB, kondom, intravagina/diafragma, kontrasepsi darurat sebagai metode kontrasepsi jangka panjang. Disisi lain ketidaktepatan waktu dalam pengiriman dari BKKBN Pusat menuju BKKN Provinsi menyebabkan adanya penumpukan persediaan pada satu gudang.

Warman (2004: 83) menjelaskan bahwa pergudangan erat sekali kaitannya dengan perhitungan sediaan dan pengendalian sediaan. Prioritas utama dalam pergudangan adalah barang yang ada harus tetap bergerak, karena apabila banyak barang-barang yang terhenti , maka akan menghalangi gerak barang yang lain

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dan akan menimbulkan perawatan barang baru yang akan menimbulkan biaya. Diperlukan tindakan cermat dan berani untuk memastikan kecepatan gerak barang tanpa harus menimbun banyak barang didalam gudang sebagai upaya untuk meminimalkan adanya usang dan barang kadaluarsa serta mengamankan aset organisasi publik, sehingga harus ada suatu kebijaksanaan yang dijalankan untuk mengatur agar persediaan terencana secara efektif dan efisien. Efektivitas adalah ukuran sudah sejauh mana tujuan dapat dicapai, tanpa memperhitungkan besarnya usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan efisien mengukur seberapa besar upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Indikator efisiensi penanganan persediaan terletak pada sistem pengukuran dan pengendalian yang baik. Tanpa pengukuran, akan terjadi kesukaran dalam pengendalian, dan tanpa pengendalian akan terjadi kekacauan dalam arus barang. Persediaan dikatakan efektif dan efisien apabila dapat mencapai tujuan secara maksimum, yakni terwujudnya kepuasan pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat dengan pengorbanan yang minimum. Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yakni berupa sebuah sistem pengendalian yang berorientasi pada upaya pengendalian persediaan di BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Upaya pengendalian persediaan dilakukan supaya instansi yang bersangkutan dapat mengetahui jumlah persediaan yang dibutuhkan, dalam hal ini terkait persediaan alat kontrasepsi. Pengendalian dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi suatu rencana yang sebelumnya sudah dibuat. Pengendalian persediaan adalah sesuatu yang memungkinkan penggunaan satu sumber penting, yaitu sistem persediaan secara sebaik-baiknya. Pengendalian persediaan yang baik terintegrasi pada kemampuannya memetakan sistem persediaan sebagai suatu keseluruhan dan ditempatkan di seluruh organisasi. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan konsep yang disatukan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mendirikan struktur pengendalian sebagai alat peninjau persediaan secara tepat dan konsisten. Semua upaya itu dilakukan guna menjaga persediaan agar senantiasa stabil sehingga dapat terhindarkan dari keadaan *overstock* (persediaan melebihi dari kebutuhan yang seharusnya) ataupun *stockout* (persediaan kurang dari kebutuhan yang seharusnya).

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibentuknya sistem pengendalian *intern* pemerintah guna mengurangi adanya *overstock* persediaan diharapkan mampu menjadi sebuah solusi pengendalian persediaan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 mengenai Sstem Pengendalian Intern Pemerintah. Oleh karena itu, penulis memilik topik dengan judul, “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Sebagai Upaya Mengurangi Overstock Persediaan Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008.**”

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menjelaskan bahwa pengendalian intern adalah sebuah sistem yang meliputi semua organisasi, metode, ketentuan yang terkoordinasi dan dijalankan dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, memastikan kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Didalam pelaksanaanya yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemahaman diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal adalah sebuah sistem, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien berlandaskan peraturan undang-undang.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Adapun tujuan sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien,
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan,
3. Pengamanan aset negara,
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terdapat 4 tujuan umum sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008:

1. Terciptanya efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi

Adanya sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi, khususnya organisasi sektor publik akan mendorong penggunaan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan yang telah ditargetkan.

2. Keandalan pelaporan keuangan

Keandalan pelaporan keuangan akan tercipta melalui penggunaan prosedur yang tepat sehingga dapat memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan, kecermatan, keandalan ukuran serta indikator kinerja instansi pemerintah.

3. Pengamanan aset negara

Pengendalian atas aset dilakukan untuk mengamankan dan melindungi aset yang berisiko seperti hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak. Aspek pengendalian tersebut meliputi otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, revidu dan audit, serta penyimpanan dan penanganan aset.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern harus berpedoman pada peraturan yang berlaku serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1.2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Unsur – unsur sistem pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Unsur sistem pengendalian intern yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian diwujudkan melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaianrisiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkatkegiatan. Selanjutnya diidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut untuk kemudian dianalisis guna mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 terdiri atas identifikasi risiko dan analisi risiko. .

3. Kegiatan pengendalian

Unsur sistem pengendalian intern yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 terdiri atas:

- a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan komunikasi

Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan komunikasi. Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan baik itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada seluruh pimpinan Instansi Pemerintah yang memerlukannya guna melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 terdiri atas: pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

5. Pemantauan pengendalian intern.

Pemantauan merupakan unsur pengendalian intern yang kelima atau terakhir. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Pemantauan berkelanjutan

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

isenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

1.2.4 Pihak yang Bertanggung jawab atas Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP)

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
2. Inspektorat Jenderal yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
3. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
4. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
5. Kementerian negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas dalam bidang tertentu.
6. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negaradan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

1.2.5 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Terindikasinya masalah terkait kelemahan pengendalian dimaksudkan untuk membantu para pelaksana/*users* sistem untuk mengidentifikasi tindakan apa yang harus diambil atau dipertimbangkan

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

guna mengatasi keterbatasan sistem yang telah dijalankan. Keterbatasan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

“Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh:

1. Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi
2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau manajemen
3. Pengguna keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian tidak diperhatikan maupun kelelahan.”(Indra Bastian, 2010:10)

1.3 Persediaan

Setiap organisasi baik yang bergerak di bidang jasa / non jasa dan memiliki tujuan utama untuk menghadirkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat umum, maka performa suatu organisasi perlu dijaga dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menjaga performa produksi dan persediaan suatu organisasi. Kontinuitas pengadaan persediaan oleh suatu organisasi dimaksudkan untuk menjamin tersedianya persediaan baik secara kuantitas maupun kualitas. Persediaan memiliki arti penting dalam suatu organisasi sektor publik sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan dari supplier dan ketidakpastian waktu tunggu pemesanan (*lead time*). Menurut PSAP 05 tentang akuntansi persediaan didalam lampiran Peraturan Pemerintah N0 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan ^{operasional} pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dari definis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan diadakannya persediaan untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan organisasi sektor publik.

1.3.1 Karakteristik Persediaan

Menurut PSAP 05 tentang akuntansi persediaan didalam lampiran Peraturan Pemerintah N0 71 Tahun 2010, karakteristik persediaan meliputi

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

1.3.2 Overstock

Keadaan terlalu banyaknya persediaan (*overstock*) ditinjau dari segi finansial atau pembelanjaan merupakan hal yang tidak efektif, disebabkan terlalu besarnya barang modal yang menganggur dan tidak berputar sehingga menyebabkan tingginya biaya penyimpanan dan *opportunity cost* (Gitusudarmo I, Mulyono A, Rangkuti F, 2000).

Kondisi stock yang berlebihan (*over stock*) pada hakikatnya tentu berdampak kurang baik terhadap pengelolaan barang di gudang sehingga akan berdampak pada kualitas barang tersebut. Dibutuhkan *effort* dan biaya tambahan untuk mengelolanya. Berikut ini merupakan beberapa kemungkinan penyebab terjadinya masalah *overstock* persediaan pada perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur:

1. Adanya kekeliruan perhitungan persediaan di gudang, hal ini terjadi jika kondisi *storage* atau penyimpanan di gudang kacau sehingga memungkinkan terjadinya slip persediaan yang tidak terhitung
2. Sering terjadi kedatangan material yang tidak sesuai dengan tanggal yang direncanakan. Alur penerimaan pada BKKBN Prov.Jatim

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

berdasarkan stock persediaan yang dikirim dari BKKBN Pusat. *Lead time* yang telah ditetapkan seharusnya menjadi acuan pengiriman dan penghabisan persediaan .

3. Penggunaan KB sebagai alat kontrasepsi jangka pendek pada masyarakat Indonesia mulai menurun dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang mulai beralih pada penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.

Masalah *overstock* ini harus diminimalisasikan karena menyebabkan banyaknya persediaan yang kadaluarsa (*expired*) sehingga berakibat pula pada *financial* suatu organisasi terkait biaya perawatan tambahan yang diperlukan dan kurang maksimalnya pelayanan sektor publik yang dapat diberikan. Oleh karena itu, persediaan perlu dikendalikan agar kebutuhan barang dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin.

1.3.3 Siklus Perencanaan Persediaan Alkon

Suatu perencanaan diperlukan bagi organisasi sektor publik guna menetapkan proses yang harus dimulai atas penetapan tujuan suatu organisasi. Sama halnya dengan persediaan, pentingnya dilakukan perencanaan persediaan untuk menjamin tercapainya tujuan terlaksana secara sistematis dan ekonomis. Tanpa diadakan perencanaan, maka akan timbul risiko bahwa suatu organisasi pada suatu waktu bisa saja tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena barang yang tidak selamanya tersedia setiap saat. Menurut Direktorat Jenderal Pelayanan dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa perencanaan pengadaan obat publik merupakan suatu proses kegiatan menentukan jenis dan jumlah obat agar sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut ini beberapa hal penting terkait perencanaan kebutuhan alkon BKKBN Provinsi Jatim :

1. Kebutuhan alkon Provinsi Jatim dipenuhi melalui perencanaan dari BKKBN Pusat. Perencanaan, pengadaan, dan distribusi dilaksanakan oleh

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BKKBN Pusat secara langsung. Distribusi dilakukan sesuai dengan permintaan resmi dari kabupaten/kota maupun berdasarkan monitoring/analisis ketersediaan (analisis ratio). Kapasitas Provinsi hanya sebatas analisis kebutuhan perencanaan alkon. BKKBN provinsi harus menerima dropping Alkon dari Pusat, meskipun kadang kapasitas Gudang tidak mencukupi untuk jumlah dropping yang dilakukan Pusat.

2. *Dropping* dari pusat didasarkan pada Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) Peserta KB Aktif (PA) dan Peserta KB Baru (PB).
3. Apabila ada kekurangan persediaan Alkon, maka dilakukan permintaan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak pernah melakukan perencanaan kebutuhan Alkon. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur hanya sebatas penyalur distribusi Alkon dari OPD KB Kabupaten/kota ke Faskes yang ada. Jika ada kekurangan alkon, maka dilakukan permintaan langsung kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

1.3.4 Mekanisme Penyimpanan Alkon

Penyimpanan persediaan alkon Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sudah mengikuti kaidah-kaidah dalam mekanisme penyimpanan yakni menggunakan metode first in first out (FIFO) dan first expired first out (FEFO). Sistem penyimpanan alkon Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Metode FIFO dan FEFO dapat mencegah terjadinya obat rusak akibat *expired date* yang telah habis.

1.3.5 Sistem Distribusi Alkon

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 30 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menjelaskan bahwa distribusi adalah proses pengeluaran dan penyerahan obat yang terjamin kualitasnya dan pengalokasian secara merata untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan kesehatan. Distribusi obat bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat di pelayanan kesehatan, menjaga kelangsungan

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

persediaan, menghindari pemakaian yang tidak bertanggung jawab, dan memudahkan pengawasan.

1.4 Kerangka Konseptual



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

1.5 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui mekanisme persediaan alkon Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui sistem distribusi alkon Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis kesesuaian penerapan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 terhadap sistem persediaan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
4. Sebagai syarat kelulusan Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1.6 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis
 - a. Memperoleh informasi mengenai mekanisme persediaan alkon Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
 - b. Memperoleh informasi mengenai sistem distribusi alkon Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
 - c. Mampu menganalisis kesesuaian penerapan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 terhadap sistem persediaan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
 - d. Memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Tugas Akhir Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bagi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
 - a. Sebagai bahan masukan, pertimbangan, dan evaluasi guna meminimalisasi overstock persediaan berdasarkan pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
 - b. Sebagai saran menjalin kerjasama pengembangan *softskill* mahasiswa dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
3. Bagi Almamater
 - a. Sebagai tolak ukur pemahaman dan praktek ilmu akuntansi dalam dunia kerja.
 - b. Sebagai literatur dan referensi tempat bagi mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga untuk menerapkan ilmu yang selama ini dipelajari di dunia perkuliahan.